

DINAMIKA PERAN WAROK DALAM POLITIK DI PONOROGO*The Dynamics of the Role of Warok in the Ponorogo Politic***Khoirurrosyidin**Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Telpon: 08125976254**ABSTRACT**

In History, Warok has important role in the Ponorogo. Both the roles of cultural, social and even political. The role of politics in particular began to be seen in the lead-birth Ponorogo as the political authority. Political role in recorded history Warok continued Roxburgh. This is evident from the various references that have been recorded by the observer of culture Ponorogo. Future political role of colonialism, after independence, the old order, the new order even order reform. History Warok as though the political elite continues to take on the role, but the dynamics have not been many who do documentation. Especially Warok role in this local politics. So this research seeks to explore, describe and analyze further the role Warok in several phases of community life Roxburgh. This study is a qualitative research with the hope to do more in-depth research and freely explore the data research. Instead of this study is limited by quantitative rules that have specific restrictions for exploration and analysis of data. The purpose of this study include: First, to determine the factors of history and philosophy of art Cultural Studies Warok reog and political figure in Ponorogo, Second, to know the process of metamorphosis Warok role of the cultural elite to the political elite, third, to know good Warok political role in the context of the past and in the present era.

Keywords: *Shifting Roles, Effect of Power*

ABSTRAK

Warok khususnya dalam sejarah Ponorogo telah memainkan peran pentingnya. Baik dalam peran-peran budaya, sosial bahkan politik. Peran politik khususnya mulai terlihat pada masa menjelang lahirnya Ponorogo sebagai otoritas politik. Peran politik warok terus tercatat dalam sejarah Ponorogo. Hal ini terlihat dari berbagai referensi yang telah dibukukan oleh para pemerhati budaya Ponorogo. Peran politik dimasa kolonialisme, pascara kemerdekaan, masa orde lama, orde baru bahkan orde reformasi. Sejarah warok sebagai elit politik meski terus mengambil peran, namun dinamikanya belum banyak yang melakukan pendokumentasiannya. Terutama peran warok dalam perpolitikan lokal kontemporer saat ini. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menggali, mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh peran warok dalam beberapa fase kehidupan masyarakat Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan harapan penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan leluasa mengeksplorasi data penelitiannya. Bukan penelitian yang dibatasi oleh ini kaidah-kaidah kuantitatif yang memiliki restriksi-ristriksi tertentu untuk melakukan eksplorasi dan analisis data. Tujuan penelitian ini antara lain : Pertama, untuk mengetahui faktor-faktor kesejarahan dan filosofi seni budaya reog dan sosok warok dalam politik di Ponorogo, Kedua, untuk mengetahui proses metamorfosa peran warok dari elit budaya ke elit politik, ketiga, untuk mengetahui peran politik warok baik dalam konteks masa lalu maupun dalam era kekinian.

Kata Kunci : Pergeseran Peran, Pengaruh Kekuasaan

PENDAHULUAN

Seni Budaya Reog Ponorogo merupakan satu dari sekian banyak seni budaya asli yang dimiliki bangsa Indonesia. Seni ini terus berkembang hingga ke seluruh

dunia. Namun berkembangnya seni reog di luar negeri sempat menimbulkan *side effect* yaitu kasus main klaim Pemerintah Malaysia terhadap seni budaya ini. Seperti diberitakan beberapa media nasional pada medio November 2007, Pemerintah Malaysia dalam

portalnya yang diluncurkan Kementerian Seni Budaya dan Pariwisata meluncurkan video selama 5 menit yang menyatakan bahwa Malaysia memiliki seni budaya lokal yang disebutnya Seni Barongan. Instrumen, karakter, personil dan atribut lainnya mirip dengan seni reog. Akibatnya peluncuran video tersebut menimbulkan respon di dalam negeri bahwa Malaysia telah mencuri seni budaya reog kita.

Kefamiliaran seni reog tidak bisa lepas dengan sosok yang disebut warok. Warok adalah sosok yang disegani karena kesaktiannya atau kontroversinya. Banyak media telah menayangkan sosok warok ini baik dari sisi positif maupun negatif.

Warok sendiri berasal dari kata *wewarah*. Dengan demikian maka Warok merupakan *wong kang sugih wewarah* (seseorang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik). Untuk dapat menjalankan peran seorang Warok, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Syarat seorang Warok adalah tubuh harus bersih karena akan diisi. Warok harus bisa mengekang segala hawa nafsu, menahan lapar dan haus, juga tidak bersentuhan dengan perempuan.

Sampai saat ini warok sejati hanya menjadi sebuah legenda yang tersisa. Namun ada beberapa kelompok warok di daerah-daerah tertentu yang masih memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan dan disegani, bahkan kadang para pejabat pemerintah selalu meminta restunya.

Berbicara tentang dinamika sosial politik di Ponorogo tentunya tidak bisa meninggalkan keberadaan warok dengan segala karakternya. Warok adalah sebutan untuk orang yang mempunyai kemampuan supra natural dan kelebihan dalam olah kanuragan. Warok adalah tokoh masyarakat yang sakti. Disatu sisi warok adalah tokoh budaya karena keberadaannya tidak bisa pisah dengan kesenian reyog dan disisi lain seorang warok

adalah seorang tokoh politik, hal ini tidak bisa lepas dari keberadaan sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh yang sangat luas.

Dengan terminologi **Keller(1984: 19)**, warok adalah seorang elit strategis yang segala pemikirannya harus diperhitungkan oleh elit penguasa karena mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Pramono (**2004: 113**), terkait dengan warok sebagai elit lokal ini, menunjukkan banyak warok yang akhirnya terakses menjadi eksekutif dan legislatif di daerahnya.

Dengan demikian para Warok Ponorogo dan para *konco Reyog* Ponorogo mulai sadar akan posisi politiknya. Di satu sisi, mereka telah menjalankan fungsi manifestnya, yaitu sebagai mobilisator massa, dan di sisi lain mereka sedang menjalankan fungsi latent-nya dengan menaikkan status sosial politiknya. Mereka semula berada pada posisi sebagai massa, dengan situasi politik yang memungkinkan, maka mendorong mereka untuk memasuki posisi sub-elit. Sementara itu, para Warok Ponorogo yang sebelumnya menempati posisi sebagai sub-elit, dengan keadaan politik yang ada, menjadi pendorong menuju posisi elit. Dengan pengertian yang agak luas, para Warok Ponorogo mulai melakukan mobilitas vertikal atau gerakan sosial vertikal ketika mereka mulai masuk organisasi-organisasi massa yang berorientasi politik.

Para warok karena posisi sosialnya yang strategis berada di tengah tengah antara penguasa dan masyarakat, seringkali hanya berperan dan menjadi instrument penggerak massa oleh para elit yang berkuasa. Namun dalam perkembangan terakhir, terjadi perkembangan peran dan fungsi yang signifikan. Para warok telah menjalankan peran dan fungsi yang penting dari sekedar tersubordinasi dari elit penguasa menjadi mempunyai kemampuan yang besar dalam posisi tawar menawar dengan elit penguasa.

Kiprah mereka dalam percaturan politik local terus berlangsung hingga jaman sekarang ini. Disamping itu mereka memperoleh derajat sosial keagamaan yang tinggi, beberapa warok telah melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekkah dan bahkan ada yang beberapa kali melakukan ibadah haji.

Sementara itu, Gaetano Mosca (**Varma: 1992; 205**) menegaskan bahwa perubahan social sangat mungkin terjadi bila elit yang ada tidak lagi mampu menjabarkan fungsinya dan akan digantikan oleh orang biasa yang karena proses belajar mampu meningkatkan kemampuannya untuk menembus posisi kelas sosial di atasnya. Mosca membagi masyarakat dalam tiga kelas yaitu, Elit, sub elit dan Massa.

Seperti dikatakan **Sudijono (1995; 16)** pada akhirnya status social seseorang akan mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Status social para warok yang baik, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Karena menyadari posisinya sebagai tokoh informal yang mempunyai pengikut tidak sedikit dan mengetahui dirinya sebagai elit strategis, maka sangat beralasan kalau mereka menaikkan harga tawar tidak hanya sebagai intrumen pengerah massa tetapi berkembang menjadi pemain politik yang diperhitungkan.

Berangkat dari fenomena diatas pergeseran peran para warok yang pada awalnya sebagai tokoh budaya yang kemudian bergeser menjadi aktor atau pelaku politik, maka Bagaimana sejarah Seni Reog dimana Warok ada didalamnya, kemudian bagaimana proses metamorfosa warok dari tokoh budaya menjadi aktor/pelaku politik, bagaimana proses-proses politik yang mendorong warok menjadi pelaku politik serta bagaimanakah peran politik mereka dalam konteks kekinian.

Kembali meminjam terminologi yang digagas Van Peursen (1988) di atas, warok Ponorogo secara dinamis terus berubah menyesuaikan perubahan zaman yang sedang terjadi. Warok mencoba menyempurnakan

hidupnya sesuai dengan tantangan zaman itu. Secara kesejarahan yang dapat diungkapkan untuk menjelaskan upaya warok merubah diri dan menyempurnakan hidup itu dapat dilihat dari jejak-jejak budaya yang telah tertulis dalam legenda, dongeng, cerita orang tua bahkan dalam literatur yang telah dibukukan dari hasil penelitian para peminat studi budaya tradisi.

Banyak literatur yang menyebutkan warok penuh dengan stigma negatif seperti suka minum-minuman keras, berjudi, suka wanita, foya-foya hingga stigma pelaku homoseksualitas. Stigma ini begitu lekatnya dalam diri warok, hampir tidak bisa dibantah jika stigma ini dalam kehidupan warok Ponorogo terutama pada era masa lalu.

Stigma ini kemudian mulai berubah. Perlahan namun pasti, warok yang identik dengan hal-hal negatif mulai luntur meski masih ada saja yang tersisa. Artinya masih ada juga warok yang kurang baik. Di era 1970-an ke atas, warok syarat dengan pelaku negatif lalu berubah menjadi aparaturnya daerah yang disegani dan dihormati. Bahkan para warok membentuk organisasi warok yang bernilai religiusitas. Para warok membentuk organisasi INTI (Insan Taqwa Illahi). Sebuah organisasi yang terdiri dari para warok yang melakukan kajian keagamaan Islam. Dan ternyata tujuan organisasi ini berhasil. Warok dari orang yang suka minum menjadi para haji yang memiliki masjid dan jamaah. Sebuah penyempurnaan hidup yang luar biasa.

Para warok, karena posisi sosialnya yang strategis berada di tengah-tengah antara masyarakat dan penguasa seringkali hanya berperan dan dijadikan instrumen pengerah massa oleh para elit yang berkuasa. Namun dalam perkembangan terakhir, terjadi perkembangan peran dan fungsi yang signifikan. Para warok telah menjalankan peran dan fungsi yang penting, dari sekedar tersubordinasi dari elit penguasa menjadi mempunyai kemampuan yang besar dalam posisi tawar-menawar dengan elit penguasa.

Kiprah mereka di dalam percaturan politik lokal terus berlangsung hingga jaman sekarang. Disamping itu untuk memperoleh derajat sosial keagamaan yang tinggi, beberapa warok telah melakukan ibadah haji ke tanah suci.

Berubahnya tabiat warok tidak lepas dari lingkungan sosial disekitarnya. Pada waktu itu pemerintah daerah sangat apreasiatif terhadap sosok warok yang memiliki posisi sebagai elit budaya dilingkungannya. Posisi warok yang dimikian adalah aset sosial budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Pendek kata telah terjadi perubahan budaya warok dari budaya negatif ke budaya positif.

Maka benar apa yang diungkapkan Ki Sarino Mangunpranoto (dalam Budiono H; 1991) bahwa budaya manusia itu berwujud karena adanya perkembangan norma hidupnya atau lingkungannya. Norma hidup itu terwujud dalam bentuk alam pikir, alam budi, alam karya alam tatasusila dan alam seni. Keluhuruan sifat-sifat hidup itulah yang melahirkan adanya rasa budaya manusia.

Warok sebagai bagian dari masyarakat sosial, ia akan terpengaruh dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budayanya. Itulah sebabnya seni budaya tidak berada dalam vakum sosial. Bourdieu (1993) menyatakan bahwa ada tiga ruang yang berhubungan satu dengan lainnya. Pertama, medan kekuasaan (*the field of power*), kedua, medan sastra (*literacy field*), ketiga medan kebiasaan dalam penciptaan (*the genesis of the producers habitus*).

Pendapat Bourdieu di atas menjelaskan bahwa warok yang lahir dari budaya itu memiliki implikasi-implikasi tertentu, salah satunya adalah implikasi kekuasaan. Sebab warok adalah pemimpin yang lahir dalam suatu proses budaya dan warok memang pada dasarnya memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang elit atau pemimpin sosial. Implikasi kekuasaan ini

secara dinamis memungkinkan berubahnya struktur sosial yang ada.

Salah satu perubahan struktur social dalam masyarakat sering ditandai dengan adanya pergeseran elit sosial dalam masyarakat dan juga munculnya elit baru dalam masyarakat. Susanne Keller (1984: 2) mengartikan elit sebagai sekelompok orang yang menduduki posisi tertentu dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Ia membagi elit menjadi tiga kelompok besar, yaitu Elit penguasa (Rulling Elite), kelas penguasa (Rulling Class dan Elit strategis (Rulling strategic). Bagi Keller, keberadaan elit strategis yang biasanya terdiri dari orang-orang atau tokoh informal dalam masyarakat perlu mendapatkan porsi perhatian yang besar, selain karena pengaruhnya yang kuat. Ia juga mempunyai pergerakan yang bebas dalam sebuah sistem. Ia sering berada di luar kursi kekuasaan tetapi pada suatu waktu ia bisa masuk atau menduduki kursi kekuasaan.

Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa warok memiliki pengaruh yang besar dalam komunitasnya. Warok menjadi pusat kehidupan sosialnya. Ia sebagai tempat bertanya, mengadu, mengeluh dan pertimbangan-pertimbangan penting masyarakatnya. Ia memiliki sifat-sifat seperti *opinion leaders*; sebagai panutan masyarakatnya, mempunyai rasa empati pada masyarakatnya dan memiliki kepedulian pada masyarakatnya.(Hidayat; 1997;88).

Fakta-fakta ini sesuai dengan pemikiran Gatano Mosca (1848-1941) bahwa elit sosial tertentu mesti ada dalam sistem politik apapun.(Audentia, No. 2 April-Juni 1993). Ini menunjukkan keberadaan elit sosial merupakan sebuah proses yang alamiah. Apakah elit itu tetap menjadi elit lokal, apakah akan berubah menjadi elit-elit dalam konteks lainnya. Elit semacam ini eksistensinya lahir dan tercipta secara kultural. Demikian juga dengan warok lahirnya sebagai elit budaya ataupun elit politik nantinya merupakan mengikuti proses kultural. Ketika Warok

dipandang memiliki kelebihan tertentu, maka secara sosial ia akan diangkat sebagai elit; tempat bertanya, minta pendapat bahkan minta bantuan secara finansial sekalipun.

Berbeda dengan Keller adalah Viepreo Pareto (Kinlock: 1977: 20) berpendapat bahwa elit adalah orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang berbeda. Pareto percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda tersebut umumnya datang dari kelas yang sama. Di sini Pareto sangat pesimis akan terjadi perubahan sosial karena yang terjadi hanyalah perubahan posisi antar elit dalam masyarakat. Pareto membagi elit menjadi dua kelompok, yaitu elit yang sedang berkuasa dan elit yang sedang tidak berkuasa.

Sementara itu, Gaetano Mosca (**Varma: 1992; 205**) menegaskan bahwa perubahan sosial sangat mungkin terjadi bila elit yang ada tidak lagi mampu menjabarkan fungsinya dan akan digantikan oleh orang biasa yang karena proses belajar mampu meningkatkan kemampuannya untuk menembus posisi kelas sosial di atasnya. Mosca membagi masyarakat dalam tiga kelas yaitu, Elit, sub elit dan Massa.

Teori Keller dan Mosca tersebut di atas percaya bahwa sikulasi kekuasaan akan terjadi tidak hanya dari kelas yang sama tetapi juga dari kelas yang berbeda. Dalam perspektif Keller, maka Warok adalah bagian dari Elit Strategi. Sementara itu menurut perspektif Mosca, Warok adalah bagian dari Sub Elit dalam masyarakat. Dengan demikian, teorinya lebih cocok bila digunakan dalam memahami fenomena perubahan struktur sosial para Warok di Ponorogo.

Dengan demikian warok yang selama ini dikenal sebagai *symbolic leader* (Usman;1998:3), yaitu seorang pemimpin yang hanya diakui oleh massa yang dipimpinnya telah berubah status menjadi seorang *visible leader* setelah menjadi kepala desa atau kepala kelurahan, yaitu pemimpin

yang diakui oleh massa yang dipimpin dan pemimpin-pemimpin lain.

Menurut Sorokin (Soekanto, 1990:279) saluran yang terpenting dalam gerak sosial ini adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi keahlian.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka data atau informasi yang akan dikumpulkan berbentuk deskripsi yang merupakan jawaban dari para Informan yang terdiri dari warok itu sendiri dan beberapa pengamat budaya di Ponorogo atas berbagai pertanyaan yang diajukan, termasuk didalamnya makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut. Dengan demikian penelitian ini akan lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan *Kualitatif*.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar diperoleh data atau informasi yang optimal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara Mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada para Warok Ponorogo yang menjadi subyek penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, aktifitas analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam wawancara mendalam. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai maka diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Menurut Sutopo (2002), proses analisis data tersebut dinamakan *Model Analisis Interaktif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti budaya lokal, Ridlo Kurnianto dalam Sarasehan bagi Seniman Reyog Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 posisi seni Reyog Ponorogo yang adalah “netral”. Kondisi ini menyebabkan kesenian yang telah populis di tanah air ini, bisa dibawa kemana-mana, termasuk bisa diklaim oleh komunitas pemeluk agama atau keyakinan tertentu. Sejak awal perkembangannya, seni ini telah dipentaskan sesuai dengan sistem keyakinan pelakunya.

Kebudayaan yang khas dengan corak kebersahajaan dan keindahan dengan simbol macan (harimau) dan burung merak itu, pada gilirannya menjadi inspirasi seniman atau budayawan pada jamannya, untuk memberikan penguatan-penguatan simbol ke arah penggalian jati diri dan karakter masyarakat Ponorogo. Perpaduan dua jenis karakter yang berlainan itu (harimau dengan karakter buas; ganas, dan burung merak dengan karakter cantik-mempesona), menyampaikan pesan yang kuat akan keberanian dan kebersahajaan masyarakat Ponorogo dalam menapaki kebenaran dengan sikap hidup yang serba menarik; indah dan mempesona.

Berbasis latar dan posisi seni Reyog Ponorogo yang ‘netral’ satu sisi dan sarat dengan nilai/tuntunan luhur pada sisi yang lain, maka masyarakat Ponorogo memiliki peluang yang cukup strategis untuk menguatkan pesan-pesan adiluhung melalui simbol-simbol dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya untuk membangun masyarakat Ponorogo, menjadi masyarakat yang kuat fisik-jiwanya dan mulia akhlak-budi pekertinya.

Konsep dan Proses Metamorfosa Warok

Secara filosofis, mengutip penelitiannya Yusuf Harsono, 2005, kata warok ada beberapa pemahaman. Ada yang memaknai

secara warok ialah seorang tokoh yang dianggap memiliki kesaktian dan berperan mengembangkan nilai-nilai lokal yang sering digambarkan dengan jujur, berani, lugu dan apa adanya. Oleh karena itu, warok sering diberi gambaran sebagai karakter orang Ponorogo.

Makna filosofi lainnya terkait dengan sosok warok, sebutan warok berakar dari kata *wewarah*. Kata *wewarah* dari bahasa arab yaitu wara’. Seperti disinggung dalam banyak literatur, pengaruh Islam dalam seni budaya reog sangat kental. Termasuk konsep nama warok ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai Islam.

Selanjutnya istilah Warok dimaknai sebagai *wong kang sugih wewarah* (seseorang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik). Untuk dapat menjalankan peran seorang Warok, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Syarat seorang Warok adalah tubuh harus bersih karena akan diisi. Warok harus bisa mengekang segala hawa nafsu, menahan lapar dan haus, juga tidak bersentuhan dengan perempuan kecuali istrinya.

Kesenian *Reyog* Ponorogo tidak bisa terlepas dari tradisi *warok*. Secara historis, belum ada data yang bisa menunjukkan secara pasti hubungan antara *reyog* dengan tradisi *warok*. Dalam perkembangannya, yang jelas tradisi *warok* ini menjadi komunitas atau semacam perkumpulan sosial (*paguyuban*) dengan nama *konco reyog*, terdiri dari tiga komponen yang saling terkait; *warok*, *warokan*, dan *jathil*. Komunitas atau perkumpulan sosial itu selanjutnya menampilkan cara dan gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat lain. Paguyuban *warok* itu akan sangat nampak, terutama ketika ada perayaan-perayaan religius, misalnya dalam acara hajatan; *bersih desa*, *ruwatan*, *mantu*, *ritual sesaji*, maupun *ritual adat tradisi*, baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih luas; daerah dan bahkan nasional.

Ditilik dari sudut etimologis, *warok* berasal dari kata *waro'i* atau *wirangi* (dalam bahasa Jawa), yang berarti *wis pono, wis mangerti banget marang agal alus lahir batin, tumindake mung kanggo tetulung marang liyan* (Purwowijoyo, 1990: IV, 49) *Warok*, berdasar pengertian itu, bisa diartikan sebagai seorang tokoh yang memiliki kelebihan-kelebihan, khususnya dalam hal ilmu *kanoragan* (kekebalan tubuh) dan berikut derajat spiritualitas tertentu. Karena itu, orang yang mendapat sebutan *warok* dan diakui secara sosial, sangatlah sedikit jumlahnya. “*Wongkang oleh sebutan warok iku ora akeh; terkadang sa desa ora ketemu siji*” (Purwowijoyo, 1985: 3) Dengan kondisi seperti itu, sering terjadi seorang *warok* membawahi, memimpin, atau dituakan oleh dua atau lebih *paguyuban reyog*. Kekuatan karakter dan kharisma ketokohnya, sering menyebabkannya memiliki pengaruh kuat bagi pendukung terhadap penguasa politik, baik pada tingkat desa hingga kabupaten. Komunitas kedua dalam tradisi *warok* adalah *warokan*. *Warokan* adalah sebuah komunitas di dalam tradisi *warok* yang sebenarnya hampir sama dengan *warok* itu sendiri. Sesuatu yang membedakan adalah *warokan* itu menempati urutan kedua setelah *warok* dalam hal fisik maupun psikisnya; dari segi usia *warokan* lebih muda (rata-rata 20-35 tahun); dari segi *kanoragan*, *warokan* memiliki kekebalan jauh dibawah *warok*; demikian halnya dari aspek kepribadian *warokan* cenderung masih labil dibanding *warok*; misalnya mereka masih sangat temperamental – mudah tersinggung, mudah marah, dan sering lepas kontrol.

Sementara itu, menurut penuturan, Muhammad Fajar Pramono, eksistensi *warok* berakar dari praktek dunia supranatural/perdukunan. Akar keberadaan *warok* dari dukun ini bisa dilihat dari kehidupan para *warok* baik pada masa lalu maupun masa sekarang. “Tidak bisa dibantah *warok* memiliki profesi sebagai orang pintar atau dukun ini,” tutur Fajar.

Sementara Tobron Turejo, 79 Tahun dalam wawancara Hari Kamis, 8 Mei 2014, seorang *warok* yang pernah menjadi lurah dan legislatif mengakui aktivitas ritual tidak bisa dilepaskan dari seorang *warok* ini. Kesaktian yang diperoleh seorang *warok* melalui beberapa cara, salah satunya dengan bertapa. Namun, Tobron mengungkapkan tidak semua *warok* melakukan perilaku ritual tertentu untuk mencapai *kanoragan* itu. Menurutnya, seorang menjadi seorang *warok* yang terpenting mau ‘ngudi’ (belajar) memahami makna kehidupan ini dengan benar.

Oleh karena itu, wajar jika Fajar Pramono mengungkapkan bahwa *warok* identik dengan dukun itu. Kepiawaian *warok* dalam melakukan perilaku ritual ini kemudian mengokohkan mereka sebagai orang penting dan layak dihormati di komunitasnya.

Kembali pada figur pemilik kekuatan supranatural ini, banyak literatur yang mengkaji tentang *warok* ini selalu dinukilkan tentang karakteristik *warok* yang memiliki kesaktian ini. Kesaktian ini diperoleh melalui perilaku ritual tertentu.

Pengaruh atau citra yang sangat besar ini mengantarkan *warok* menjadi elit tradisional masyarakat Ponorogo. Ia akan lebih di ‘wongke’ sebagai pemimpin *konco reog*, untuk menyebut kelompok seni reog ini. Sebagai pemimpin ia memiliki anggota yang banyak; yaitu anggota *konco reog* ini. Secara politis, *warok* adalah pemimpin yang dapat menggerakkan massa untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

Dalam hal ini *warok* mengalami metamorfosa dari dukun ke jabatan politik. Dukun merupakan peran sosial budaya, sedangkan jabatan politik diawali dengan banyak *warok* menjadi lurah atau kepala desa pada masa orde baru. Menurut Tobron Turejo, melihat potensi ini, pada tahun 1976 para *warok* oleh Bupati Ponorogo pada waktu itu, yaitu Bupati H. Sumadi diangkat menjadi kepala desa/lurah dilingkungannya.

Pengalaman dieksekutif dan ditopang oleh kemampuan menggerak massa ini, pasca

reformasi politik, partai politik politik mulai tertarik melirik warok menjadi alat politik/ mesin politik baik sebagai *vote getter* maupun dipasang sebagai calon legislatif.

Awal Keterlibatan Warok Dalam Politik

Menurut Fajar Pramono, jejak keterlibatan warok dalam politik kenegaraan tampak dari perpindahan kekuasaan politik dan teritorial dari Kerajaan Wengker ke Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Bathoro Katong. Warok ketika masa Kerajaan Wengker berkuasa para warok setia kepada penguasa Wengker. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan Raden Bathoro Katong, para warok memindahkan loyalitasnya kepada Raden Bathoro Katong sebagai penguasa politik yang baru di Ponorogo.

Proses ini menunjukkan warok melakukan afiliasi penguasa dan mengikuti siapa penguasa yang sedang berkuasa. Warok dalam era ini sangat kental dibawah kendali penguasa. Fajar mengasumsikan warok dalam peran politiknya ini lebih seperti tentara. Tentara itu siapa penguasa politiknya, mereka akan tunduk dan loyal terhadapnya. Warok dalam hal ini memainkan peran sebagai *stabilisator*. Siapa yang kuat dan memegang kendali kekuasaan, warok akan mendukungnya. Begitu seterusnya.

Dalam sejarah selanjutnya, peran sebagai stabilisator itu sangat tampak sekali. Pramono, 2005, dalam Penelitiannya yang berjudul *Politisasi dan Kulturisasi Seni Budaya Reog sebagai alat Komunikasi Politik*, berdasarkan wawancara dengan Mbah Wo Kucing (Almarhum) seorang warok yang disegani di Ponorogo menuturkan, bahwa warok dan seni reyog dijadikan alat politik penguasa politik.

Pasca kemerdekaan pemanfaatan warok dan seni reyog untuk kepentingan politik mulai terlihat pada tahun 1959. Sekelompok aktivis politik mendirikan Barisan Reog Nasional (BRN). Aktivis yang

membentuk BRN pada mulanya belum terindikasi dari kelompok politik mana asalnya. Pembentukan ini menjelang digulirkannya konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) sebuah konsep politik yang mencoba menyatukan antara kaum nasionalis, agamawan dan komunis. Jumlah anggota BRN pada waktu itu mencapai 461 kelompok reog.

Ternyata BRN ditumpangi para aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Maka mengetahui hal tersebut banyak group reog akhirnya memutuskan untuk keluar dari BRN pada tahun 1963. Sebanyak 28 kelompok reog yang berlatar agama Islam kemudian mendirikan KRIS (Kelompok Reog Islam), kalangan PNI keluar dari BRN lalu mendirikan BRAN (Barisan Reog Nasional).

Sementara itu, Yusuf Harsono *Pengurus Yayasan Reog Ponorogo* mengungkapkan, peran politik warok dalam perpolitikan lokal mulai riil menjelang tahun 1965 para warok secara sadar atau tidak sadar sudah mulai masuk pada mobilisasi partai komunis Indonesia, sebagian besar para warok adalah kelompok tokoh masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi memiliki peran social dan pengaruh yang cukup kuat di komunitasnya atau dilingkungannya, karena ketokohan itulah sehingga menarik PKI untuk merekrut dan memanfaatkan para warok sebagai pengerah massa untuk mendulang suara pada pemilu. Mereka bernaung di LEKRA (Lembaga Kesenian Rakyat), SOKSI, Barisan Tani Indonesia (BTI), karena ketidak fahaman mereka itulah para warok mudah sekali di kendalikan oleh PKI untuk mendukung dan di mobilisasi sesuai keinginan PKI. (Wawancara, 15 Mei 2014).

Pada tahun 1976, ketika Golkar (Golongan Karya) pada masa orde baru berkuasa, warok dan konco reog berada di belakang Golkar. Banyak warok diakomodasi pemerintah daerah untuk menduduki jabatan publik dan politik. Banyak warok yang diangkat menjadi kepala desa atau lurah. Pengangkatan warok menjadi kepala desa ini

merupakan babak baru peran dalam kanvas politik modern di Ponorogo. Ketika itu yang menjabat Bupati Ponorogo adalah Bupati Sumadi.

Diangkatnya warok dalam jabatan struktural ini, menurut Tobron agar para warok ikut menjaga ketertiban dan keamanan daerah dari bahaya yang mengancam ketentraman daerah. Dan terbukti pengangkatan warok menjadi kepala desa, keadaan daerah aman dan tertib.

Hal yang sama diungkapkan Yusuf Harsono dari Yayasan Reog Ponorogo. Menurutnya, “Pada masa orde baru peran warok semakin diperlukan oleh penguasa dan menjadi incaran partai politik, para warok sebagai tokoh seni sekaligus tokoh masyarakat jelas memiliki pendukung dan massa yang real, sehingga potensi inilah yang menarik penguasa dan partai politik untuk memanfaatkan keberadaan para warok tersebut”. (Wawancara tanggal 15 Mei 2014).

Peran warok dalam wilayah politik terus berlanjut. Sejalan dengan dinamika perpolitikan di tanah air dan daerah khususnya, banyak warok yang mendapat tawaran dari partai politik.

Menurut Yusuf Harsono, pengurus Yayasan Reog Ponorogo, warok efektif untuk dimanfaatkan sebagai vote getter partai politik karena faktor ketokohnya. Sementara itu, bagi Tobron tawaran dari partai politik itu harus dipikirkan secara rasional. Artinya, jangan sampai warok hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, tetapi sebaliknya warok jika memang terjun ke partai politik harus mampu berbuat dan memegang peranan yang penting. Bukan sekedar dimanfaatkan seketika untuk meraup suara.

Peran Politik Warok Dalam Era Kekinian

Dalam era kekinian, peran warok dalam politik dapat dilihat dari dua kurun waktu. Pertama, era pasca reformasi dan era 2000-an. Era pasca reformasi peran politik warok dalam level politis-legislasi dengan dicapainya

posisi di anggota dewan. Sedang era 2000-an adalah era pasca jabatan legislatif, dimana era ini tidak ada lagi anggota dewan dari unsur warok. Dengan kondisi ini warok lebih sebagai pemimpin simbolik tanpa peran yang strategis lagi.

Peran politik warok sebenarnya masih diharapkan dalam konteks kekinian. Ini terlihat dari diundangnya forum warok dalam INTI dan paguyuban Kepala Desa se-Ponorogo dengan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor Ponorogo di Wisma Gontor pada tanggal 19 Juli 2004 silam. Tujuan pertemuan ini, tulis M. Fajar Pramono dalam bukunya *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah* yang diterbitkan CV. Adi Cemerlang Surakarta adalah warok dan komponen masyarakat lainnya perlu dilibatkan untuk membahas masa depan Kabupaten Ponorogo khususnya mengkritisi pembangunan Ponorogo yang sedang berjalan. Selain itu, pertemuan ini bertujuan mencermati visi, misi dan figur calon bupati Ponorogo yang ideal. Diundangnya warok dan INTI ini menunjukkan peran politik mereka masih diperlukan bagi masa depan daerah ini.

Kini tidak ada warok senior yang lahir dari sejarah dan kultur perjuangan yang menduduki jabatan politik. Bagaimana mereka masih memberikan pengabdian? Tobron Turejo mengungkapkan Ia masih mencoba memberikan pengabdian yang terbaiknya. Misalnya Ia masih meluangkan waktu dalam organisasi *Antisipasi Kewaspadaan Dini* Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya Ia masih ditawari lagi jabatan ketua dalam Organisasi Mengantisipasi Bahaya Laten Komunis. Namun Ia tidak bersedia mengingat beberapa hal antara lain karena faktor usia dan faktor teknis lainnya.

Peran warok dalam pilkada ini termasuk informasi terkini, baik masih relevannya peran warok dalam perpolitikan, maupun adanya varian baru figur warok seperti yang diungkapkan Fajar Pramono di atas. “Menjelang pilkada Ketokohan para warok dalam berpolitik semakin mendapat

pengakuan karena warok menjadi tempat kedua setelah kyai pondok Gontor untuk dimintai restu oleh para calon Bupati, hal ini membuktikan bahwa pengaruh warok masih sangat kuat dimata para calon Bupati, cabup masih mempercayai bahwa pengaruh warok masih cukup kuat untuk mendulang suara pada saat pilkada. (Wawancara dengan Yusuf Harsono 15 Mei 2014).

Fakta lain yang menguatkan hal itu, kata Fajar, Tobron Turejo (selaku Dewan Pembina Partai Golkar Ponorogo) sempat konflik dengan dengan para elit Golkar dari kalangan muda. Konflik ini diberitakan beberapa media lokal beberapa waktu lalu. Konflik yang menimpa warok Tobron Turejo di partainya dengan kalangan muda ini menunjukkan figur warok mengalami penurunan kewibawaan dalam ranah politik praktis. Namun, dalam ranah politik non partisan, peran warok masih menunjukkan eksistensinya. Misalnya, kegiatan sosial, agama dan budaya. Ini terkait dengan penawaran beberapa pihak yang meminta warok Tobron misalnya untuk menjadi ketua atau pembina di organisasi sosial kemasyarakatan yang ada.

Menurut pengamatan Fajar Pramono, seperti tertulis dalam bukunya, "Politik Lokal dan Pemerintah Daerah," menurun peran warok dalam perpolitikan di Ponorogo disebabkan beberapa hal, antara lain : Pertama, mulai campur tangannya para botoh/penjudi dalam even-even politik di Ponorogo. Dalam kondisi ini, maka yang berperan dalam menentukan peta politik di Ponorogo adalah botoh, bukan warok lagi seperti halnya pada masa lalu. Kedua, masyarakat semakin pragmatis dan rasional. Artinya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang tidak lagi simbol, tetapi isi, tidak lagi mitos, tetapi fungsi dan kontribusi. Bukan lagi dongeng-dongeng, tetapi solusi. Ketiga, masyarakat semakin mandiri dan tidak lagi tergantung tokoh (baca:warok) karena faktor pendidikan dan akses informasi. Konsekuensinya di ranah politik dan budaya yang dulu banyak idominasi warok kini banyak diperankan oleh tokoh lain

seperti pendidik, akademisi, LSM, pengusaha, birokrat dan sebagainya.

Secara mendasar, seiring dengan semakin langkanya figur warok dalam budaya baru di Ponorogo, menurut Yusuf Harsono dari Yayasan Reog Ponorogo, dampak warok yang berpolitis akhirnya memunculkan fenomena baru yaitu warok menjadi komoditas politik juga, gelar warok kehormatan menjadi perdebatan, Abu Rizal Bakri dinobakan sebagai warok kehormatan, hal ini bisa terjadi karena warok Tobron adalah mantan anggota DPRD Ponorogo dari partai Golkar dan saat ini menjadi dewan pertimbangan partai Golkar Ponorogo. Warok Bikan dikukuhkan sebagai anggota Penasehat Partai Demokrat.

Wacana baru tentang warok dalam perpolitikan ini sekaligus menunjukkan peran warok dalam politik kekinian lebih sekedar dalam peran-peran simbolik saja, bukan peran politik yang lebih mendasar yang lebih menentukan arah kebijakan pembangunan di Ponorogo di masa mendatang.

Pembahasan

Di awal penyajian data diungkapkan bahwa seni reog merupakan karakter masyarakat Ponorogo. Karakter itu tampak dari seni budaya reog yang khas dengan corak kebersahajaan dan keindahan dengan simbol macan (harimau) dan burung merak itu, pada gilirannya menjadi inspirasi seniman atau budayawan pada jamannya, untuk memberikan penguatan-penguatan simbol ke arah penggalan jati diri dan karakter masyarakat Ponorogo. Perpaduan dua jenis karakter yang berlainan itu (harimau dengan karakter buas; ganas, dan burung merak dengan karakter cantik-mempesona), menyampaikan pesan yang kuat akan keberanian dan kebersahajaan masyarakat Ponorogo dalam menapaki kebenaran dengan sikap hidup yang serba menarik; indah dan mempesona.

Karakter-karakter tersebut juga terepresentasi dalam sosok warok Ponorogo.

Di muka telah disajikan data bahwa cikal bakal warok dan hingga kini masih ada warok yang menjalani sebagai dukun/ahli supranatural. Dalam konteks kebudayaan Jawa kuno pada umumnya, dukun adalah sosok yang membantu masyarakat dalam menangani kesulitan hidup, baik menyangkut kesehatan atau permasalahan sosial yang tidak terpecahkan, meski berbau animis dan dinamisme.

Untuk menganalisis proses kultural warok menjadi elit budaya ini, Van Peursen, 1988, 14, mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan semacam *sekolah* dimana manusia dapat belajar. Dalam masyarakat warok belajar menjadi tokoh panutan. Ketika sudah ditokohkan itu, warok belajar menjadi orang yang bijak dan bermanfaat bagi tatanan sosial, budaya dan politik yang melingkupinya sehingga perjalanan metamorfosa warok dari orang biasa lalu menjadi tokoh informal hingga akhirnya menjadi tokoh formal dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitan ini, Hidred Geertz (dalam Magnis Suseno;1985) mengatakan bahwa dalam masyarakat Jawa ada dua kaidah pola pergaulan yang dijunjung tinggi. Pertama, kaidah yang menganjurkan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya selalu bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Kedua, kaidah yang menuntut agar manusia dalam hal bicara dan bersikap atau membawakan dirinya senantiasa hormat pada orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

Kaidah tersebut tampaknya berlaku betul dalam konteks peran warok dalam politik. Warok yang disegani karena ilmu kanoragannya merupakan sumber kewibawaan yang luar biasa. Dimilikinya ilmu kanoragan ini mengangkat derajat dan posisi warok dalam masyarakatnya. Ketika ia berbicara dan bersikap karena memiliki dan derajat kewibawaan, maka sikap dan perilakunya akan diikuti oleh masyarakatnya. Sehingga ketika ia menjadi pimpinan *konco*

reog segala perintahnya akan dituruti oleh anggotanya. Demikian juga ketika ia diangkat menjadi kepala desa, maka warga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Makanya ketika para warok ini menjabat kepala desa keadaan daerah sangat aman berbeda dengan kondisi sebelumnya.

Terkait relasi warok, budaya dan politik ini, Kuntowijoyo, 1999;118 mengungkapkan dalam bukunya, "Budaya dan Masyarakat," bahwa politik tidak lain dari pergumulan budaya. Artinya, konsekuensi-konsekuensi budaya mampu melahirkan peradaban politik maupun aktor-aktor politik. Warok merupakan representasi pemikiran tersebut. Seperti kita ketahui, warok adalah pelaku seni budaya. Ia lahir, tumbuh dan besar melalui budaya seni reog. Sehingga dari generasi ke generasi, seni reog melahirkan politisi-politisi di jamannya.

Yang menarik diungkapkan dari paparan diatas, warok telah memainkan beberapa peran yaitu sebagai stabilisator keamanan daerah, sebagai eksekutif, dan sebagai legislatif dipihak lain. Dalam penyajian data telah banyak disinggung bagaimana warok telah diangkat sebagai kepala desa yang ternyata ada peran yang diharapkan dari pemerintah daerah menyangkut keamanan.

Sejalan semakin habisnya para warok karena dimakan usia, dan mulai lahirnya warok baru dengan karakter yang berbeda. Warok senior mulai terpinggirkan peran politiknya. Seperti diungkapkan di sajian data, Tobron Turejo sebagai Dewan Pembina Golkar harus dimarginalkan oleh politisi muda hingga hampir terjadi konflik fisik. Sebuah peristiwa yang memilukan dimana warok yang dihormati harus menerima perilaku yang demikian memilukan itu.

Dalam hal ini, Gaetano Mosca (**Varma: 1992; 205**) menegaskan bahwa perubahan social sangat mungkin terjadi bila elit yang ada tidak lagi mampu menjabarkan fungsinya dan akan digantikan oleh orang biasa yang karena proses belajar mampu meningkatkan kemampuannya untuk menembus posisi kelas sosial di atasnya. Mosca membagi

masyarakat dalam tiga kelas yaitu, Elit, sub elit dan Massa.

Lebih lanjut, untuk menganalisis mengikuti proses perjalanan peran warok dalam politik di Ponorogo dapat dilihat dari terminologi yang dikembangkan CA. Van Peursen dalam suatu model budaya dalam tiga tahap. Yaitu tahap mitologi, tahap ontologi dan tahap fungsional. Yang dimaksud dengan tahap mistis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepeng oleh kekuatan-kekuatan gaib disekitarnya. Yang dimaksud tahap ontologis ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepegangan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal ikhwal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dulu dirasakan sebagai kepegangan. Ia mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar hakekat segala sesuatu dan segala sesuatu menurut perinciannya.

Tahap fungsional ialah sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam manusia modern. Ia tidak terpesona lagi oleh lingkungannya (mistis), ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap obyek penyelidikannya (sikap ontologis). Ia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya.

Pada tahap mistis, peran warok dalam ranah sosial politik diikuti oleh masyarakat sebab warok dianggap memiliki kemampuan supranatural yang mampu mengatasi masalah-masalah masyarakat. Warok dianggap sakti dan mampu melindungi masyarakatnya. Anggapan ini mengantarkan warok menjadi elit budaya yang disegani lingkungan. Selain disegani karena kemampuan supranatural, masyarakat juga merasa takut dengan warok jika melakukan perlawanan. Akibatnya kekuasaan sosial politik warok terlihat sentralistik.

Ketika masyarakat masuk dalam tahap ontologi dan fungsional, warok yang semula dihormati karena mampu menguasai alam gaib, seiring dengan semakin terdidiknya

masyarakat bahwa mistis itu tidak rasional, maka mengakui warok sebagai orang yang sakti itu sama saja tidak rasional alias kuno. Masyarakat menuntut kemampuan seorang pemimpin dalam tahap ontologi apalagi tahap fungsional adalah figur pemimpin yang mampu memecahkan masalah ke arah yang lebih riil. Pemimpin bisa mengentaskan kemiskinan, memfasilitasi pendidikan murah, mengurangi beban masyarakat, pendidikan murah dan sebagainya. Bukan pemimpin yang mengedepankan simbol yang miskin makna dan miskin peran.

Model ini benar-benar mirip dengan apa yang diungkapkan M. Fajar Pramono di depan yang perlu peneliti tampilkan lagi. Menurunnya peran warok dipengaruhi beberapa hal antara lain : mulai campur tangannya para botoh/penjudi dalam even-even politik di Ponorogo. Dalam kondisi ini, maka yang berperan dalam menentukan peta politik di Ponorogo adalah botoh, bukan warok lagi seperti halnya pada masa lalu. Faktor berikutnya masyarakat semakin pragmatis dan rasional. Artinya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang tidak lagi simbol, tetapi isi, tidak lagi mitos, tetapi fungsi dan kontribusi. Bukan lagi dongeng-dongeng, tetapi solusi. Dan terakhir, masyarakat semakin mandiri dan tidak lagi tergantung tokoh (baca:warok) karena faktor pendidikan dan akses informasi. Konsekuensinya di ranah politik dan budaya yang dulu banyak didominasi warok kini banyak diperankan oleh tokoh lain seperti pendidik, akademisi, LSM, pengusaha, birokrat dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan diatas, maka Jika disimpulkan, maka peran warok dalam kehidupan politik dapat diuraikan menjadi 3 peran: Pertama peran politik warok sebagai stabilisator politik. Peran ini dapat dilakukan warok sejak jaman mulai berkembangnya Ponorogo hingga masa awal reformasi. Kedua, peran politik warok sebagai eksekutor/eksekutif. Dengan jabatan warok

sebagai kepala desa/kepala kelurahan/kamituwo merupakan jabatan politik yang sifatnya melaksanakan kebijakan/undang-undang. Jabatan ini dapat diperankan dengan baik oleh para warok. Ketiga, peran warok sebagai legislator. Posisi ini semakin menguatkan peran warok dalam kehidupan politik di Ponorogo. Posisi politik ini selain membuat peraturan/kebijakan juga peran warok dalam mengantarkan para kandidat calon kepala daerah untuk memenangkan pertarungan politik sehingga dapat menjadikan kandidat menjadi Bupati/Wakil Bupati Ponorogo. Keempat, peran warok sebagai sumber mendapatkan pertimbangan. Warok adalah mereka yang dituakan oleh masyarakat. Peran mereka masih dibutuhkan untuk memberikan sumbang sarannya bagi kemajuan kabupaten ini. Hal tersebut terlihat dari masih dilibatkannya oleh komponen lain untuk membahas masa depan Ponorogo dalam banyak forum.

Kelima, peran warok mengalami penurunan dari peran mendasar yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ke peran yang sifatnya simbolik. Dilain pihak, warok lebih sebagai simbolik leader. Sekedar simbol tanpa diikuti substansi perannya. Warok juga telah menjadi komoditas politik.

Warok diakui atau tidak, disukai atau tidak adalah bagian dari sejarah Ponorogo. Peran mereka baik dalam tataran sosial, budaya apalagi politik memegang peranan yang cukup signifikan. Jiwa dan semangat warok harus terus ditumbuhkan dikalangan generasi muda Ponorogo. Jiwa warok ini tidak boleh hilang dari sejarah kota ini. Olehkarena itu perlu dilakukan pengkaderan terhadap jiwa warok ini agar kita tidak kehilangan jejak sejarah.

Untuk itu perlu adanya lembaga yang betul-betul mengkaji masalah budaya di Ponorogo. Kalaupun sudah ada Yayasan Reog Ponorogo yang telah dibentuk oleh Pemda Ponorogo harus terus ditingkatkan perannya dalam mengembangkan tradisi warok dan seni budaya reog pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- CA Van Peursen, 1988, Strategi Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta
- Harsono, Jusuf dan Santoso, Slamet 2005, "Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok Ponorogo" Dalam Jurnal Fenomena Vol 2 no 1 Juli 2005, LPPM Unmuh Ponorogo
- Keller, Suzane, 1994, "penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern", Penerbit Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta
- Kinlock, Graham C, 1977, Sociological Theory, Its development and Major Paradigme"
- Ridlo Kurnianto, 1997, Dampak Kesenian Reyog Ponorogo Terhadap Jiwa Keagamaan Konco Reyog di Kabupaten Ponorogo
- Pramono, 2004, "Budaya Reyog dan Komunikasi Politik dan Kulturisasi Seni Budaya Reyog Dalam Praktek Politik di Ponorogo", Dalam Jurnal Fenomena Vol 1 no 2 Juli 2004, LPPM Unmuh Ponorogo
- Purwowijoyo, 1985, Babad Tanah Ponorogo, _____
- Soekanto, Soerjono, 1990, " Sosiologi Suatu Pengantar" Penerbit Rajawali, Jakarta
- Sudijono Sastro Admojo, 1990, " Perilaku Politik," Penerbit IKIP Semarang
- Sunyoto Usman, 1998, "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, UNS Press, Solo
- Varma, SP, 1992." Teori Politik Modern" Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Jurnal Audentia, Vol. 1 N0. 2 April-Juni 1993.
- Jurnal Fenomena Unmuh Ponorogo Vol. 1 N0. 1 Januari 2004
- Jurnal Fenomena Unmuh Ponorogo Vol. 2, no. 2 Juli 2005
- Jurnal Fenomena Unmuh Ponorogo, Vol. 6 No. 1 Januari 2009